

KEHUJJAHAN HADIS MENURUT IMAM MAZHAB EMPAT

M. Nasri Hamang

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: nasri_hamang@yahoo.co.id

Abstract: This article presents the opinion of imams of four Islamic legal schools (mazhab) regarding the validity of hadits as the source of Islamic law. This study shows that the opinion of the imams on that issue is various. According to Abu Hanifah, al-sunnah can be accepted as the source of Islamic law with the condition that it is related by reliable men. As to hadits ahad, he requires that it does not contradict the principles agreed upon by 'ulama, and its content (matan) does not concern with general issues, nor does it contravene the qiyas. He even accept the hadits mursal if it does not contradict the Quran. While according to Malik bin Anas, hadits can be accepted as the argumentation (hujjah), not only for hadits mutawatir, but also for hadits masyhur, hadits mursal, and hadits ahad, with the condition that they do not contradict the actions of Madinah scholars. Idris al-Syafi'i contends that hadits ahad can be accepted as the source of Islamic law with the requirement that it is related by dhabith transmitter. This is also the case with the hadits mursal. According to Syafi'i, the status of hadits mutawatir is higher than hadits ahad and hadits mursal. Another imam, Ahmad bin Hanbal, uses all kinds of hadits, mutawatir, ahad, mursal, and dha'if, as the sources of Islamic law. He even prefers hadits dha'if

Kata Kunci: Kehujjaan, hadis, Imam Mazhab.

I. PENDAHULUAN

Kedudukan hadis tergolong amat istimewa. Ia sebagai sumber hukum Islam kedua sesudah *al-Qur'an*. Yusuf Musa menyatakan, sejak abad pertama lampau, seluruh umat Islam menempatkan hadis pada peringkat pertama sesdah *al-Qur'an al-'Azhim*. Seluruh umat Islam merujukan urusan-urusan keagamaan kepada-nya.¹

'Ajjaj al-Khathib menyatakan pula, *al-Qur'an* dan hadis merupakan dua sumber hukum Islam yang bersifat permanen. Tidaklah mungkin bagi umat Islam, termasuk para *mujtahid* dapat mengetahui masalah-masalah *syar'iyyah* tanpa menoleh kepada keduanya.² Bahkan Abdul Karim Amrullah lebih menegaskan,

sunnah adalah sumber sendidri dan berdiri sendiri.³

Kedudukan hadis yang demikian istimewa tersebut, faktanya memang telah mendapat di hati umat Islam, dalam arti benar-benar menerimanya sebagai hukum atau ajaran Islam. Dari waktu ke waktu nyaris tidak lagi akan mempersoalkan tentang kedudukannya itu. Dalam sejarah, hanya ada sekelompok kecil dari kalangan umat Islam telah menolak hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Mereka dikenal dengan sebutan *inkarus-sunnah*.⁴

Namun yang banyak yang menjadi permasalahan di kalamgaan umat Islam ialah kriteria sebuah hadis untuk dapat menjadi hujjah. Karena itu dalam tulisan ini, akan diuraikan kriteria penilaian kehujjaan haidis menurut imam mazhab,

yakni mazhab yang lahir dalam periode (110-350 H) yang tetap berkembang sampai sekarang, yang dikenal dengan Imam Mazhab Empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

II. PEMBAHSAN

A. Pendapat Imam Mazhab Empat tentang Kriteria Kehujjahan Hadis.

1. Pendapat Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dalam mengambil sumber atau dalil hukum dalam menghadapi tuntutan ketetapan hukum terhadap masalah-masalah yang dihadapinya atau yang timbul di tengah-tengah masyarakat, ia menempatkan hadis sebagai sumber penetapan hukum yang kedua sesudah *al-Qur'an*. Hal ini diketahui melalui ulasan yang diberikan al-Baghdadi dalam buku tarikhnya, di mana Abu Hanifah berkata: *Saya terlebih dahulu mengambil pada kitab Allah, tetapi kalau saya tidak menemukan di dalamnya, maka saya mengambil pada sunnah Rasulullah saw.*⁵

Banyak ulama yang menuduh Abu Hanifah mendahulukan *qiyas* dari pada hadis. Namun tuduhan itu hanyalah didorong oleh perasaan apriori belaka. Al-Sya'rani dalam kitabnya, *al-Mizan al-Kubra* menulis, bahwa Abu Hanifah berkata: Demi Allah, telah berdusta dan telah mengada-ada terhadap saya, orang yang mengatakan, sesungguhnya saya mendahulukan *qiyas* atas *nash*. Apakah diperlukan *qiyas* sesudah ada *nash*.⁶

Jumhur ulama telah menegaskan, Abu Hanifah ber-*hujjah* dengan *hadis mutawatir*. Sebagian ulama Hanafiyah menyamakan *hadis masyhur* dengan *hadis mutawatir*; dan sebagian dari mereka menegaskan, *hadis masyhur* tidak menyangkut soal yang bersifat keyakinan, melainkan hanya yang

bersifat *zhanni* (di luar keyakinan atau akidah). Dengan kata lain, *hadis masyhur* dapat diamalkan dan di bawah peringkat *hadis mutawatir*.⁷

Dari keterangan di atas, nampak ada perbedaan di kalangan ulama pengikut Abu Hanifah dalam mendudukkan hadis sebagai *hujjah*. Ada yang menyamakan derajat *hadis masyhur* dengan *hadis mutawair*; dan ada yang berpandangan peringkat *hadis masyhur* berada di bawah *hadis mutawatir*. Ada dualism persepsi, namun pada hakikatnya, keduanya menyetujui hadis mutawatir sebagai hadis yang dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum.

Abu Hanifah menerima hadis ahad dengan menetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

- Periwayatnya tidak menyalahi riwayatnya
- Riwayatnya tidak menyangkut soal yang umum
- Riwayatnya tidak menyalahi *qiyas*.⁸

Hadis ahad didahukukan atas *qiyas*, jika:

- Qiyas* yang 'illat-nya *mustanbath* dari sesuatu yang *zhanni*
- Istinbath zhanni* walau dari asal yang *qath'i*
- Di-*istinbath*-kan dari yang *qath'i*, tapi penerapannya pada *furu'* adalah *zhanni*.⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, ternyata Abu Hanifah menggunakan *qiyas* untuk menilai hadis ahad sebagai alat untuk memproduksi hukum Islam. Dengan demikian dapat dikatakan, posisi *hadis ahad* bagi Abu Hanifah berada di bawah *qiyas*.

Abu Hanifah dapat menerima hadis mursal dalam membina hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan *al-Qur'an*, *hadis masyhur* dan keterangan *syara'*.¹⁰

Pada prinsipnya Abu Hanifah menetapkan *al-Qur'an* sebagai sumber hukum Islam yang pertama, menerima *sunnah* jika datang dari orang yang terpercaya, menerima *hadis ahad* sesudah *al-Qur'an*, jika *hadis ahad* tidak bertentangan dengan kaedah yang telah di-*ijma'*-i oleh ulama, tidak teemasuk soal yang umum dan tidak menyalahi *qiyas*'. Abu Hanifah menerima juga hadis *mursal* sebagai hujjah jika tidak bertentangan dengan *al-Qur'an*, serta menggunakan hadis *mutawatir* sebagai hujjah. Sedangkan terhadap ke-hujjah-an *hadis masyhur*, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Hanafiyah.

2. Pendapat Imam Malik bin Anas

Imam Malik adalah imam dalam bidang fikih dan hadis. Hal ini terlihat padal kitabnya, *al-Muwaththa'*. Al-Qadhi 'Iyadh menyebutkan dalam kitab al-Madari, bahwa dasar pengangan dalam menetapkan hukum Islam ada empat, yaitu *al-Kitab*, *al-sunnah*, '*amal ahli Madinah* dan *qiyas*'.¹¹

Menurut Imam Malik, dididukkan *al-sunnah* terhadap *al-Qur'an* dalam tiga hal, yaitu:

- Mentaqrir-kan hukum hukum dalam *al-Qur'an*
- Menerangkan apa yang dfikehendaki *al-Qur'an*
- Mendatangkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam *al-Qur'an*.¹²

Mencermati pendapat Imam Malik tersebut, dapat ditegaskan bahwa Imam Malik dalam membina hukum Islam, ia menempatkan *al-sunnah* sebagai sumber pengambilan hukum yang kedua sesudah *al-Qur'an*. Imam Malik memandang keberadaan *al-sunnah* sekaligus sebagai sumber bagi timbulnya hukum baru di luar *al-Qur'an*.

Imam Malik menegaskan, dirinya menerima *hadis mursal*, *hadis*

munqathi' dan hadis-hadis yang disampaikan periwayat kepadanya yang (dalam kitab *al-Muwaththa'*) *di-ta'bir-kan* dengan '*ibarat balaghani* (sampai kepadaku), walaupun ia tidak terangkan sebab-sebab ia menerima hadis-hadis tersebut, mengingat pada masa itu, belum dipersoalkan ulama tentang kedudukan *hadis mursal*; dan ia sendiri tidak menerima hadis melainkan dari orang yang dipercayai.¹³

Imam Malik menegaskan pula, dirinya berpegang kepada '*amal penduduk Madinah* dan menggunakan *qiyas* dalam membina dan menetapkan masalah hukum yang dihadapinya.¹⁴

Adapun *hadis ahad*, ulama-ulama Malikiyah tidak mengamalkannya bila bertentangan dengan *amalan-amalan* atau '*urf* ulama-ulama Madinah, menginat ada pandangan yang mengatakan, *amalan-amalan ulama Madinah* sama dengan riwayatnya.¹⁵

Pada intinya, Imam Malik membina hukum-hukum Islam dengan berdasarkan *al-Qur'an* sebagai sebagai sumber pembinaan yang pertama, kemudian *sunnah* sebagai sumber pembinaan yang kedua. Dalam hal hadis, Imam Malik menerima *hadis masyhur*, *hadis mursal* dan *hadis mutawatir* serta *hadis ahad*. Sementara khusus *hadis ahad*, Imam Malik memberi syarat, yaitu tidak bertentangan dengan *amalan-amalan ulama Madinah*.

3. Imam Syafi'i

Imam al-Syafi'i membagi prosedural ilmiah penetapan dalil-dalil hukum dalam lima tingkatan dengan urutan sebagai berikut:

- Al-Kitab* dan *al-Sunnah*. Ditempatkannya *al-sunnah* sejajar dengan *al-Kitab* karena *al-sunnah* merupakan penjelas bagi *al-Kitab*, walau *hadis ahad* tidak senilai dengan *al-Kitab*.

- b. *Ijma'* ditempuh dalam berbagai masalah yang tidak diperoleh dalilnya dari *al-Kitab* dan *al-sunnah*. *Ijma'* dalam hal ini, ialah *ijma'*-nya para *fujaha* yang memiliki ilmu khusus.
- c. *Qawl* (pendapat) sebagian sahabat yang diketahui, tidak ada *qawl* lain yang menyelisihinya.
- d. *Qawl-Qawl sahabat* yang bertentangan dengan *qawl-qawl* sahabat juga; dalam hal ini, mengambil *qawl* yang paling kuat.
- e. *Qiyas*, yaitu menetapkan hukum suatu masalah dengan menyamakan (mengkias) hukum yang sudah dietapkan oleh dalil di atas.¹⁶

Menyimak pembagian prosedural ilmiah tersebut, dapat diketahui, bahwa Imam Syafi'i dalam membina hukum Islam, ia menemaptkan *al-Qur'an* dan *hadis* sebagai tempat bersandarnya *ijma'*, *qawl sahabat* dan *qiyas*. Dengan kata lain, bahwa sumber yang digunakan Imam Syafi'i dalam membina hukum, hanyalah dua, yaitu *al-Qur'an* dan *hadis*. Adapun dalil-dalil lain dalam urutan tingkatan di atas, hanyalah merujuk kepada *al-Qur'an* dan *hadis*.

Dalam kitabnya, *al-Risalah*, Imam Syafi'i mengajukan sejumlah dalil yang membuktikan ke-*hujjah-an* *al-sunnah*. *Hadis ahad*, Imam Syafi'i menerimanya, namun dengan syarat sebagai berikut:

- a. Periwayatnya adalah orang yang dipercaya
- b. Periwayatnya berakal atau memahami apa yang diriwayatkan
- c. Periwayatnya dhabith
- d. Periwayatnya benar-benar mendengar hadis itu dari orang yang meriwayatkannya
- e. Periwayatnya tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis yang sama.¹⁷

Sedangkan *hadis mursal*, Imam Syafi'i tidak menerima secara mutlak dan tidak menolaknya secara mutlak. *Hadis mursal* dapat diterima Imam Syafi'i dengan dua syarat; *pertama*, *hadis mursal* itu disampaikan oleh *tabi'in* yang banyak berjumpa dengan sahabat; *kedua*, ada petunjuk yang menguatkan *sanad hadis ahad* itu. Walaupun *hadis mursal* diterima Imam Syafi'i sebagai *hujjah*, namun menurutnya tidaklah sederajat dengan hadsi ahad; dan demikian juga *hadis ahad*, dapat diterima, tetapi tidak sejajar dengan *al-Qur'an* dan *hadis mutawatir*.¹⁸

Adapun kedudukan *hadis* terhadap *al-Qur'an*, menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. Menerangkan *ke-mujmal-an al-Qur'an*, seperti menerangkan *ke-mujmal-an* ayat shalat
- b. Menerangkan '*am al-Qur'an*, yaitu '*am* yang dikehendaki *khash*
- c. Menerangkan fardu-fardu dari fardu-fardu yang telah ditetapkan *al-Qur'an*
- d. Menerangkan mana yang *nasikh* dan mana yang *mansukh* dari ayat-ayat *al-Qur'an*.¹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, tergambar dengan jelas, bahwa Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum menempatkan *sunnah* sejajar dengan *al-Qur'an*. Menurutnya, kedua dalil itu sama-sama berasal dari Allah dan keduanya merupakan sumber ajaran Islam.

Imam Syafi'i memakai *ijma'*, *qawl* sahabat dan *qiyas* dengan merujuk pada kedua sumber ajaran Islam tersebut. Selanjutnya, Imam Syafi'i menerima *hadis ahad* sebagai *hujjah* dengan syarat, harus dari periwayat yang dapat dipercaya dan memenuhi kriteria *tam al-dhabit*. Imam Syafi'i menerima juga *hadis mursal* dengan syarat, periwayatnya banyak berjumpa dengan

sahabat dan *sanad*-nya dapat dipercaya. Menurutnya, posisi hadis mutawatir lebih tinggi dari pada *hadis ahad* dan *hadis mursal*.

4. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal

Sumber kedua yang diperpegangi Imam Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan hukum terhadap masalah yang dihadapinya, adalah *al-sunnah*. Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan, untuk mencari apa yang ada dalam *al-Qur'an* harus melalui *al-sunnah*. Jika ada orang yang mencari sesuatu dalam *al-Qur'an* tanpa melalui, maka ia akan menempuh jalan kesesatan. Hal ini karena:

- a. Al-Qur'an mengharuskan kita mengikuti Rasul (*sunnahnya*)
- b. Ada hadis-hadis yang mengharuskan kita mengikuti Rasul dan melarang kita menghadapi *al-Qur'an* saja dan membelakangi *al-sunnah*
- c. Hukum yang di-*ijma*-i oleh paramuslimin banyak yang diambil dari *al-sunnah*, karena itu menghilangkan *al-sunnah*, berarti menghilangkan 9/10 hukum Islam.²⁰

Jumhur ulama berpendapat bahwa *hadis ahad* hanya dapat digunakan dalam bidang '*amali* (pengamalan) dan tidak boleh digunakan dalam bidang *i'tiqadi* (akidah). Akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis ahad dalam kedua bidang tersebut, baik itu '*amali* maupun *i'tiqadi*.²¹

Imam Ahmad bin Hanbal menerima *hadis mursal* jika berasal dari seorang *sahabi* atau seorang *tabi'in* atau *tabi'-tabi'in*. Hadis yang datang dari luar kelompok tersebut, tidak diterimanya. Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah seorang pembina hukum Islam dan banyak yang mengikutinya. Ia menerima hadis *dha'if* bila keadaan darurat.²²

Imam Ahmad bin Hanbal memegangi hadis yang berkualitas

dha'if, dengan syarat, periyatnya bukan orang yang sengaja berdusta dan tidak menemukan penjelasan masalahnya dalam hadis, baik dalam *hadis shahih* maupun dalam *hadis hasan*.²³

Kererangan di atas menggambarkan dengan jelas, Imam Ahmad bin Hanbal mengakui ke-*hujjah*-an *al-sunnah* dengan tegas dan jelas, dengan menggolongkan orang-orang yang menolak *al-sunnah* sebagai orang-orang sesat. Imam Ahmad bin Hanbal ber-*hujjah* dengan *hadis mutawatir*, *hadis ahad*, *hadis mursal* dan *hadis dha'if*. Bahkan ia mendahulukan *hadis dha'if* dari pada *qiyas*.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan tersebut, dapat dikatakan, bahwa para Imam Mazhab Empat dalam kegiatan menetapkan hukum terhadap seluruh masalah yang dihadapi pada masa hidupnya sebagai ulama mujtahid, menggunakan hadis sebagai sumber yang kedua. Namun demikian, di antara mereka menekankan persyaratan-persyaratan bagi sebuah hadis yang dapat diterimanya sebagai *hujjah*.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah menjadikan *al-sunnah* sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum-hukum *syari'ah*, dengan syarat, *al-sunnah* itu diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan. Sedangkan khusus *hadis ahad* ia persyaratkan, harus tidak bertentangan dengan kaedah yang telah disepakati oleh ulama dan *matan*-nya tidak menyangkut soal-soal yang umum serta tidak bertentangan dengan *qiyas*. Bahkan *hadis mursal* pun diterimanya jika tidak bertentangan dengan *al-Qur'an*.
2. Imam Malik bin Anas memegangi *hadis* sebagai *hujjah*, bukan hanya pada

hadis mutawatir, melainkan juga pada *hadis masyhur*, *hadis mursal* dan *hadis ahad*; tetapi dengan syarat, tidak bertentangan dengan *Amalam Ulama Madinah*.

3. Imam Idris al-Syafi'i mendudukkan *hadis ahad* sebagai hujjah, jika *hadis ahad* itu diriwayatkan oleh periyat yang memenuhi kriteria *dhabith*. Demikian juga halnya *hadis mursal*, ialah jika periyatnya banyak berjumpa dengan sahabat dan *sanad*-nya pun dapat dipercaya. Menurut Imam Syafi'i, posisi *hadis mutawatir* lebih tinggi dari pada *hadis ahad* dan *hadis mursal*.
4. Imam Ahmad bin Hanbal ber-hujjah dengan *umumnya hadis*, baik *hadis mutawatir*, *hadis ahad*, *hadis mursal* maupun *hadis dha'if*. Ia pun mendahulukan *hadis dha'if* dari pada *qiyas*.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah Karim, *Pengantar Ushul Fiqhi*, Cet. II; Jakarta: Jaya Murni, 1996.

Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jilid I, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

-----, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jilid II, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973

Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah – Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

al-Khathib, 'Ajjaj, *Ushul al-Hadits 'Ulumuh wa Mushthalahuh*, Cet. II; Damaskus: Dar al-al-Fikr, 1957 M/1375 H.

Musa, Yusuf, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, t. tp.: Dar al-Kutub al-Jadidah, 1958 M/1398 H.

Catatan Akhir:

1. Lihat Yusuf Musa, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, (t. tp. : Dar al-Kutub al-Jadid, 1958 M/1398 H), h. 227.
2. Lihat 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits 'Ulumuh wa Mushthalahuh*, (Cet. III ; Damaskus: Dar al-Fikr, 1975 M/1375 H), h. 35.
3. Karim Amrullah, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Cet. III ; Jakarta : Jaya Murni, 1966), h. 39.
4. M. Syuhudi Ismail, *Kaedah-Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 76.
5. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jilid I, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), h. 134.
6. Lihat *ibid*.
7. Lihat *ibid.*, h. 145.
8. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I, (Cet. VI ; Jakarta : Bulan Bintang, 1986), h. 103.
9. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, *op. cit.*, h. 147.
10. Lihat *ibid.*, h. 149
11. Lihat *ibid.*, h. 173.
12. *Ibid.*, h. 187-188.
13. Lihat *ibid.*, h. 171
14. Lihat *ibid.*
15. Lihat T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Dirayah Hadis*, *op. cit.*, h. 103.
16. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jilid II, *op. cit.*, h. 13.
17. Lihat *ibid.*, h. 21.
18. Lihat *ibid.*, h. 22.
19. Lihat *ibid.*, h. 24
20. Lihat *ibid.*, h. 52.
21. Lihat *ibid.*, h. 54.
22. Lihat *ibid.*, h. 55.
23. Lihat *ibid.*, h. 58.